

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN
PATI

 27/12/24

Ida Aprillia, Dr. Drs. R Slamet Santoso, M.Si

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang, Semarang

Telepon (024) 7465407 Faksimilie (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the implementation of the 12 years compulsory education policy in Pati Regency. Although this program aims to improve access and quality of education, various challenges are still faced, including low public awareness, lack of facilities, and curriculum incompatibility. Using a qualitative approach and based on Merille S. Grindle's theory of public policy implementation, this research reveals the factors that influence program success. The research results show that although policies have succeeded in increasing access to education, there are still challenges in terms of quality, equity and availability of resources. Factors such as policy design, institutional capacity, and socio-economic conditions of society also influence its implementation. The research findings highlight the importance of effective communication, adequate support, and commitment from various stakeholders in ensuring the success of the 12-year compulsory education program. To overcome these challenges, it is recommended to strengthen educational capacity institutions, develop sustainable teacher training programs, and allocate special budgets to improve infrastructure in remote areas. In addition, active community participation through school committees can increase program effectiveness. The findings of this research highlight the importance of participatory and community-based approaches in achieving the goals of 12 years of compulsory education.

Keywords: 12 years of compulsory education, Policy Implementation, Quality of Education

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai fungsi yang krusial terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat (Anwar, 2022). Kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan kurikulum menjadi tolak ukur kesuksesan pendidikan pada mencapai tujuan tersebut (Munthe, 2020) Pembangunan suatu negara di pengaruhi oleh faktor bagaimana kualitas sumber daya manusianya (Susilo, 2020).

Pemerintah memiliki peran penting pada mengoptimalkan kualitas pendidikan dengan mengutamakan pendidikan di semua golongan rakyat dan menngoptimalkan kualitas pendidikan dengan memprioritaskan pendidikan di semua kalangan masyarakat serta memenuhi hak seluruh warga negara pada mendapatkan Pendidikan (Shabur et al., 2023). Permasalahan pendidikan adalah masalah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat (Patandung & Panggua, 2022). Hal ini menyebabkan, banyak anak Indonesia tidak mampu untuk melanjutkan sekolah. Aspek-aspek yang berpengaruh terhadap putusnya anak sekolah yaitu kurangnya keinginan dan kemauan untuk sekolah (Zetta & Nurwati, 2021). Siswa tidak berminat pada

sekolah, ketidakmampuan mengikuti / mengambil pelajaran, ekonomi keluarga, orang tua kurang perhatian, dan lingkungan bermain anak – anak (Yaneri et al., 2022).

Kabupaten Pati telah menerapkan program wajib belajar 12 tahun, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengaturan Pendidikan. Pada Pasal 57 Ayat 2, disebutkan bahwa penda memiliki 4 tanggung jawab untuk memastikan program ini terlaksana (Sulthon, 2019). Peraturan tersebut tidak hanya mengatur pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan hingga membentuk karakter dan peradaban bangsa yaang bermartabat, demi mencerdaskan kehidupan bangsa (Ainiyah, 2013). Program ini dirancang gara meningkatkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang bertegang teguh pada ajaran agama sehingga mampu menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Margiyanti & Maulia, 2023). Sebagai program unggulan, wajib belajar 12 tahun merupakan wujud komitmen nyata pemerintah daerah Kabupaten Pati dalam menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas

bagi semua warganya (Safruddin & Jabar, 2017). Untuk memastikan kesuksesannya, peraturan ini menetapkan beberapa indikator utama, yaitu: 1.)Ketersediaan biaya operasional pendidikan, 2.)Pemberian beasiswa bagi siswa yang membutuhkan, 3.)Tingkat kelulusan siswa yang optimal. Namun, pelaksanaan program ini di Kabupaten Pati belum mencapai hasil yang maksimal. Bidang pendidikan masih menghadapi tantangan utama, yakni rendahnya akses dan kualitas pendidikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat (Susilo, 2020). Hal ini diakibatkan pada berbagai aspek, yaitu: (1) Layanan pada sekolah dasar yang belum maksimal; (2) Sekolah SMP, pendidikan untuk anak kecil, dan belajar di luar sekolah seperti program kejar paket.; (3) Kurikulum yang belum sepenuhnya selaras dengan perkembangan zaman dan kurangnya pengelolaan tenaga pendidik serta kependidikan secara maksimal; serta (4) Lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan Pendidikan.

Data yang membuktikan hanya 786 dari 45.925 penduduk usia 16 – 18 tahun yang terlayani oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengindikasikan adanya kesenjangan yang signifikan pada

penyediaan layanan publik. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi antara lain kekurangan tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan sertifikasi, serta terbatasnya kapasitas sumber daya manusia pada perencanaan dan pelaksanaan program SPM. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Pati telah merumuskan berbagai strategi, salah satunya adalah penyalarsan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Pradipta et al., 2022).

Tabel 1 Perkembangan Rata - Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pati Tahun 2020 – 2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	7,44%	7,48%	7,79%	7,80%	7,80%

(Sumber: Data Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah III Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan Tabel 1 , tampak bahwa Rata – Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pati terjadi penambahan dari tahun 2020 hingga 2024. Jika dibandingkan dengan target provinsi yang sebesar 8%, Kabupaten Pati belum berhasil mencapai angka tersebut.

Teori Implementasi Merile S. Grindle menyatakan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh

dua faktor utama: isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dalam konteks program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati, isi kebijakan sudah jelas, tercermin dalam adanya Perda dan petunjuk teknis pelaksanaan yang mendukung. Program ini selaras dengan tujuan pembangunan nasional dalam peningkatan sdm melalui Pendidikan (Fitramadhana, 2023). Kesuksesan program ini dapat diukur dengan melihat indikator keaktifan siswa, angka putus sekolah, dan rata-rata lama sekolah (Munandar et al., 2023). Selain itu, keterlaksanaan program ini juga dinilai feasible, mengingat sumber daya yang tersedia di Kabupaten Pati sudah memadai untuk mendukung implementasinya. Namun, lingkungan implementasi program ini masih perlu dioptimalkan. Dukungan politik dari pemerintah daerah sudah cukup baik, namun dukungan masyarakat perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi tentang manfaat pendidikan 12 tahun (Wardani, 2015). Kapasitas pelaksana, seperti kualitas guru dan tenaga kependidikan, perlu ditingkatkan untuk mendukung program ini. Sumber daya, seperti infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, perlu ditingkatkan untuk memastikan akses

pendidikan yang merata. Keterlibatan stakeholder, seperti kerjasama dengan pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil, perlu dioptimalkan untuk mendukung program ini (Sitopu et al., 2023).

Teori Implementasi Merilee S. Grindle menawarkan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980:10) dan Qade (1984:310), implementasi kebijakan memerlukan keterkaitan dan sinergi antara tiga variabel utama yang memengaruhi kesuksesannya, yaitu kebijakan itu sendiri, organisasi pelaksana, dan lingkungan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan implementasi kebijakan sangat bergantung pada hubungan yang harmonis dan efektif antara ketiga elemen tersebut. Tachjan menambahkan bahwa implementasi kebijakan juga memerlukan beberapa unsur pokok yang tidak boleh diabaikan, yaitu: (1) unsur pelaksana, yang mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab menjalankan kebijakan; (2) adanya program yang jelas dan terstruktur; dan (3) target group atau kelompok sasaran, yang merupakan pihak yang langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan solusi yang tepat, seperti sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat pendidikan 12 tahun, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, pemerataan kualitas pendidikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta kerjasama dengan pihak swasta untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun (Aprima, 2019). Walaupun ada berbagai kendala, dengan solusi yang tepat dan kerjasama semua pihak, program wajib belajar 12 tahun diharapkan dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Pati.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan program

wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dituliskan tujuannya sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor - faktor apa sajakah yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati.

Kajian Pustaka

1. Administrasi Publik

Administrasi adalah sesuatu cara komprehensif pada semua kegiatan yang berlangsung pada suatu organisasi untuk memperoleh target organisasi itu (goals and objectives) (Hidayah & Dewi, 2022). Publik adalah sekelompok individu yang serupa pada berasumsi, mengungkapkan pendapat, ambisi, pendirian, dan perilaku setara dengan adat yang masih berjalan (Pasolong, 2014 :6).

2. Paradigma Penelitian

Pembahasan terkait administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari perubahan paradigma administrasi publik yang berlangsung selama ini. Perubahan tersebut disebabkan oleh model lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menyebabkan ketidakpercayaan terhadap paradigma yang ada, sehingga upaya dilakukan untuk membangun model baru (Alamsyah, 2016).

Thomas S. Khun (Syafiie, 2010:26) menjelaskan bahwa paradigma merupakan sesuatu perspektif, etika, etika, landasan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, yang diterima oleh komunitas ilmiah pada waktu tertentu. Secara singkat, paradigma adalah cara berpikir individu atau kelompok. Nicholas Henry pada Keban (2014:31-33) menyatakan bahwa ada enam paradigma administrasi negara yaitu:

- 1) Paradigma 1: Dikotomi Politik dan Administrasi (1900 - 1926).
- 2) Paradigma 2: Prinsip - prinsip Administrasi (1927 - 1937).
- 3) Paradigma 3: Administrasi sebagai Ilmu Politik (1950 - 1970).

4) Paradigma 4: Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956 1970).

5) Paradigma 5: Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara (1970 -?).

6) Paradigma 6: Governance (1990 - sekarang).

Penelitian ini termasuk pada paradigma ke - 5: Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara. Paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara berfokus pada kepentingan publik, sejalan dengan tujuan implementasi kebijakan publik yang efektif.

3. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sekumpulan metode atau konsep yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik yang sedang berlangsung. Setiap kebijakan publik yang dibuat pasti memiliki tujuan tertentu, dan berdasarkan jenisnya, kebijakan publik memiliki beragam tujuan (Kristian, 2023). Tujuan pembentukan kebijakan meliputi pengelolaan dan distribusi sumber daya, pengaturan atau pemberian

kebebasan, mobilisasi sumber daya, pengendalian dinamika yang terlalu cepat, penguatan negara, serta penguatan pasar.

Thomas R. Dye pada Nugroho (2012:120) menjelaskan kebijakan Publik mencakup segala hal yang dikerjakan maaupun yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Tahapan dalam proses kebijakan publik yang diungkapkan oleh Thomas R. Dye pada Nugroho (2012:159) terdiri dari enam fase, yaitu:

- 1) Identifikasi masalah (problem identification)
- 2) Penetapan agenda (agenda setting)
- 3) Formulasi kebijakan (policy formulation)
- 4) Legitimasi kebijakan (policy legitimation)
- 5) Implementasi kebijakan (policy implementation)
- 6) Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Pada dasarnya, ada tiga langkah utama dalam peraturan publik: merumuskan prosedur, melaksanakan prosedur, dan mengevaluasi prosedur.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan merangkum berbagai kondisi, peristiwa, atau fenomena dalam realitas sosial masyarakat yang diteliti (Wiksana, 2017). Sebagaimana ditegaskan Basrowi dan Suwandi (2008:27), penelitian kualitatif menekankan pada analisis induktif terhadap data yang dikumpulkan pada suatu bidang yang spesifik dan unik untuk mengembangkan hipotesis atau teori yang dapat dibagikan secara luas. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati. Adapun lokasi penelitian mencakup: (1) Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Provinsi Jawa Tengah, (2) Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, (3) Dewan Pendidikan Kabupaten Pati, (4) SMP, SMA, SMK di Kabupaten Pati, dan (5) Masyarakat. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah non-probability sampling dan purposive sampling (sampel bertujuan). Menurut Sugiyono (2019:85), purposive sampling adalah metode

pemilihan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan tujuan tertentu, di mana sampel dipilih karena dianggap dapat mewakili dan memahami permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Isi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang dialih bentuk menjadi transkrip, dapat dijelaskan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati membuktikan karakteristik "isi kebijakan" yang kompleks dan dinamis sebagaimana dijelaskan pada teori Grindle. Kebijakan ini telah berhasil mengintegrasikan berbagai dimensi, seperti fokus pada keadilan dan inklusivitas, peningkatan kualitas pembelajaran, fleksibilitas pada adaptasi, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Namun, implementasi kebijakan ini juga belum optimal karena masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan kualitas pendidikan dan keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah membuktikan upaya yang signifikan untuk mencapai tujuan pendidikan

yang lebih berkualitas dan merata, namun masih membutuhkan perbaikan dan evaluasi secara berkala untuk mencapai hasil yang optimal.

2. Lingkungan Implementasi

Implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati, sebagaimana dianalisis melalui lensa teori Grindle, membuktikan gambaran yang kompleks dan dinamis. Dari sisi isi kebijakan, kebijakan ini telah berhasil mengintegrasikan berbagai aspek penting seperti keadilan, kualitas, dan fleksibilitas. Namun, tantangan seperti kesenjangan dan keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Dari sisi lingkungan implementasi, kebijakan ini dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai aktor, karakteristik lembaga, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat. Komitmen politik yang kuat, sinergi antar pemangku kepentingan, dan budaya organisasi sekolah yang mendukung menjadi faktor kunci kesuksesan. Secara keseluruhan, kebijakan ini telah membuktikan progres yang signifikan pada mencapai tujuan pendidikan yang lebih berkualitas dan merata. Namun, untuk mencapai hasil yang

optimal, diperlukan upaya berkelanjutan pada mengatasi tantangan yang ada, serta evaluasi yang berkala terhadap efektivitas kebijakan.

3. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati membuktikan sejumlah indikator positif terkait faktor-faktor pendukung kesuksesan kebijakan publik. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan telah dirumuskan dengan cukup jelas dan relevan dengan kondisi lokal, meskipun masih terdapat tantangan pada mencapai pemerataan kualitas pendidikan. Kedua, komunikasi antar organisasi yang terlibat pada pelaksanaan kebijakan telah membuktikan perkembangan yang baik, namun masih perlu ditingkatkan pada hal penyelarasan persepsi dan koordinasi program. Ketiga, karakteristik badan pelaksana, seperti Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah, membuktikan adanya komitmen dan kapasitas yang cukup memadai pada melaksanakan kebijakan, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kapasitas

teknis dan administratif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesuksesan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati dipengaruhi oleh perumusan kebijakan yang jelas, koordinasi antar lembaga yang baik, serta kapasitas institusi yang memadai. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, diperlukan upaya berkelanjutan pada meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan, terutama pada hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

4. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati menghadapi beberapa hambatan yang dapat dijelaskan melalui lensa teori Van Meter. Pertama, komunikasi dan interpretasi kebijakan menjadi tantangan utama. Meskipun terdapat upaya sosialisasi, namun pemahaman mengenai tujuan dan mekanisme kebijakan masih beragam, terutama di kalangan masyarakat dan bahkan di antara para pelaksana di tingkat sekolah. Penggunaan bahasa yang kurang sederhana, kurangnya contoh

konkret, dan perbedaan latar belakang pendidikan menjadi faktor penghambat. Kedua, dukungan yang diberikan belum sepenuhnya optimal. Meskipun ada dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, namun masih terdapat ketidakmerataan pada distribusi sumber daya, kekurangan tenaga pengajar, dan kualitas pembelajaran yang belum merata. Hal ini membuktikan bahwa faktor lingkungan seperti ketersediaan sumber daya dan kualitas infrastruktur juga menjadi kendala signifikan. Ketiga, faktor disposisi dari para pelaksana kebijakan, khususnya guru, juga perlu diperhatikan. Meskipun secara umum pemahaman guru cukup baik, namun perbedaan tingkat pemahaman dan motivasi pada mengimplementasikan kebijakan dapat mempengaruhi kesuksesan program. Keseluruhan temuan ini membuktikan bahwa implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan asumsi teori Van Meter, yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif, dukungan yang

memadai, dan kesiapan dari para pelaksana kebijakan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis peneliti pada penelitian Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati ditarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati.
 - a. Implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati sudah berjalan cukup optimal karena sesuai dengan regulasi Perda Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati pada beberapa faktor sudah berjalan dengan optimal, sejalan dengan kerangka kerja implementasi kebijakan. Hal

ini terlihat dari beberapa aspek, seperti (1) Kepentingan kelompok sasaran; (2) Tipe manfaat; (3) Pelaksanaan program.

c. Akan tetapi ada beberapa hal perlu dibenahi dan dioptimalkan lagi, seperti: (1) Derajat perubahan yang diinginkan; (2) Letak pengambilan keputusan; (3) Sumberdaya yang dilibatkan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati.

a. Kesuksesan pelaksanaan kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati dapat dijelaskan melalui analisis faktor - faktor pendukung kesuksesan kebijakan publik, seperti (1) Ukuran - ukuran dan tujuan kebijakan; (2) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan - kegiatan

pelaksanaan; (3) Karakteristik badan - badan pelaksana.

b. Analisis terhadap faktor penghambat implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati mengungkap beberapa tantangan signifikan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat, (1) Isi kebijakan; (2) Informasi; (3) Dukungan.

c. Ditemukan faktor pendukung dan penghambat lainnya yang perlu diperhatikan pada analisis implementasi kebijakan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pati berdasarkan hasil observasi peneliti. Faktor pendukung, (1) Partisipasi masyarakat; (2) Dukungan orang tua. Faktor

penghambat, (1) Perbedaan status sosial ekonomi.

Saran

Adapun saran yang dirumuskan peneliti untuk penelitian Implementasi Kebijakan Progam Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati:

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam implementasi dapat dilakukan langkah sebagai berikut.
 - (a) Pemerintah perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap derajat perubahan yang diharapkan dari implementasi;
 - (b) Pemerintah perlu melakukan analisis lebih mengenai proses pengambilan keputusan;
 - (c) Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
2. Untuk menyelesaikan hambatan faktor faktor dapat dilakukan langkah sebagai berikut. (a)

Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap isi kebijakan untuk memastikan relevansi dan kesesuaian dengan kondisi lokal serta kebutuhan masyarakat; (b) Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas informasi terkait kebijakan harus terus dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang efektif; (c) Pemerintah perlu adanya peningkatan dukungan baik dari segi finansial maupun non-finansial, termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

3. Menindaklanjuti ditemukannya faktor lainnya disarankan penelitian lanjutan mengenai Implementasi Kebijakan Progam Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pati.

Daftar Pustaka

- Ainiyah, N. (2013). PEMBENTUKAN KARAKTER MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Jurnal Al-Ulum*, 13(1), 25–38.
- Alamsyah, A. (2016). PERKEMBANGAN PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK (*New Public Administration, New Public Management dan New Public Service*). 04(2).
- Anwar, K. (2022). Implementasi dan Relevansi Kebijakan Dalam Pemerataan Pendidikan: Studi Literatur Pelayanan Publik. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(3), 419–428. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i3.2496>
- Aprima, S. G. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI. 1, 18–28.
- Fitramadhana, R. (2023). Pendidikan di Dalam Agenda Pembangunan Indonesia Education in the Midst of Indonesia ' s Development Agenda
Keywords : Critical Discourse. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 08(1), 55–81. <https://doi.org/10.17977/um021v8i1p55-81>
- Hidayah, D. D., & Dewi, N. R. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI KABUPATEN TASIKMALAYA. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(72), 214–220.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Margiyanti, I., & Maulia, S. T. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*,

- 3(1).
- Munandar, A., Nurholizah, S., Artika, D. T., & Mahroja, S. (2023). *Evaluasi Program Pendidikan : Tinjauan Terhadap Efektivitas dan Tantangan*. 9(2), 128–136.
- Munthe, M. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN KURIKULUM DITINJAU DARI SUDUT MANAJERIAL*. 14(2), 269–279.
<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>
<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>
- Patandung, Y., & Panggua, S. (2022). *Analisis Masalah-Masalah Pendidikan dan Tantangan Pendidikan Nasional Pendahuluan Metode*. 12(2), 794–805.
- Pradipta, A. W., Naryoso, A., & Yusriana, A. (2022). *Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Pati dalam Penerapan Smart Governance*. 10(4).
- Safruddin, C., & Jabar, A. (2017). *Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta*. December.
<https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Shabur, A., Amadi, M., Hasan, S., & Rifanto, N. A. (2023). *Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia : Sebuah Fakta yang Signifikan*. 18(1), 161–171.
<https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14798>
- Sitopu, J. W., Pitra, D. H., Muhammadiyah, M., & Nurmiati, A. S. (2023). *PENINGKATAN KUALITAS GURU : PELATIHAN DAN*. 4(6), 13441–13447.
- Sulthon. (2019). Pendidikan Dasar Inklusif di Kabupaten Pati: Harapan dan Kenyataan. *Journal of Disability*

Studies, 6(1), 151–172.

Susilo. (2020). Peran Pendidikan Dalam Membentuk Masyarakat yang Berbudaya. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(1), 1–10.

Wardani, W. K. (2015). *Implementasi program wajib belajar 12 tahun di provinsi dki jakarta (studi kota administrasi jakarta timur)*. 1–18.

Wiksana, W. A. (2017). *Studi Deskriptif Kualitatif tentang Hambatan Komunikasi Fotografer dan Model dalam Proses Pemotretan*. 10(1), 121–132.

Yaneri, A., Nike, V., & Vivi, S. (2022). ANALISIS PENYEBAB ANAK ANALISIS PENYEBAB ANAK PUTUS SEKOLAH BAGI KELUARGA MISKIN (Studi Kasus Anak Usia Sekolah Pada Keluarga Miskin di Kampung Lio Kota Depok). *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial Vol.*, 4(1), 76–89.

Zetta, Z. Z., & Nurwati, R. N. (2021). PENGARUH KELUARGA PADA

ANAK PUTUS SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 173–179.